



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI SAKIP 2023
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PADA
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II**



**Pengadilan Negeri Pandeglang
Kelas II**

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten



Pengadilan Negeri Pandeglang



info@pnPandeglang.go.id



pn-pandeglang.go.id



Pengadilan Negeri Pandeglang



pnPandeglang



0852-1620-4443



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

Pandeglang, 28 November 2024

Nomor : 2995 /KPN.W29.U2/RA1.10/XI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri
Pandeglang Tahun 2023

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

di-

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Tembung
KOTA SERANG

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor :
2204/KPT.W29.U/RA1.10/VII/2024 hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri
Pandeglang Tahun 2023, bersama ini kami kirimkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pengadilan Negeri Pandeglang, terlampir dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS

Tembusan Yth.

1. Arsip

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang.

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Banten pada Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 merupakan komitmen nyata segenap Aparatur Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selanjutnya penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP sebagai salah satu komponen SAKIP, bertujuan untuk melaporkan tindak lanjut evaluasi capaian kinerja atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Berbekal semangat dan kerja keras serta niat luhur untuk mensejahterakan rakyat, Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II telah berhasil mewujudkan capaian kinerja.

Akhir kata, kami berharap melalui penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II Tahun 2024, dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, agar kedepan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, eifisien, dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II yang Agung".

Pandeglang, 28 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.
Nip. 19800312 200312 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Banten pada Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga SAKIP Pengadilan Negeri Pandeglang lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang.

Dengan berakhirnya Tahun 2023, maka LKJip Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2023 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pandeglang.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024. Pengadilan Negeri Pandeglang berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	85 % 94 %	82,5 % 100 %	97,05 % 106,38 %
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5 %	NIHIL	NIHIL
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	87 % 87 %	90,31 % 90,31 %	103,80 % 103,80 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %	NIHIL	NIHIL
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	74 %	119,56 %	88,48 %
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		15 %	7,69 %	51,26 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	3,57 %	3,97 %

Daftar isi

PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
Daftar isi	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
BAB II	12
TINDAK LANJUT	12
A. Penilaian	12
B. Rekomendasi	15
a. Perencanaan kinerja	15
b. Pengukuran kinerja	16
c. Pelaporan Kinerja	17
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17
C. Tindak Lanjut	18
a. Perencanaan kinerja	18
b. Pengukuran kinerja	18
c. Pelaporan Kinerja	18
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	19
BAB III PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Banten pada Pengadilan Negeri Pandeglang adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai hasil evaluasi atas capaian kinerja terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

1. Program Prioritas

Sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II memiliki program Prioritas antara lain :

a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas II telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-pandeglang.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Pandeglang;
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Pandeglang;
- Website Pengadilan Negeri Pandeglang, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pandeglang;
- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Pandeglang;
- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan.

b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

• PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II.

- **Pojok e-Court dan Eraterang**
Memberikan bantuan layanan kepada Pencari Keadilan baik kepada advokat maupun non advokat antara lain pendaftaran pengguna advokat dan non advokat, pendaftaran perkara, serta konsultasi layanan permasalahan ecourt bagi pengguna.
- **Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian.**
Dalam rangka pengukuran Kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.
- **PN Pandeglang Mobile (e-PIN)**
Dalam kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan melalui smartphone, Pengadilan Negeri Pandeglang menghadirkan aplikasi PN Pandeglang Mobile dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi ini telah tersedia dan dapat diunduh melalui Playstore.
- **Nomor Layanan SIKAT**
Nomor layanan komunikasi dan informasi masyarakat yang dapat dipergunakan untuk melakukan aktivitas percakapan (chatting), panggilan telepon, maupun panggilan video (video call) guna keperluan penyampaian informasi pengadilan kepada masyarakat.
- **Aplikasi QR Code (E-Brosur Kepaniteraan)**
E-Brosur Kepaniteraan merupakan optimalisasi standar layanan pengadilan khususnya untuk kepaniteraan perdata, pidana dan hukum. Layanan ini memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses mengenai prosedur layanan kepaniteraan.

2. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II, terkait Belanja Modal, Perawatan/Pemeliharaan seperti Pemeliharaan gedung tidak mencukupi serta pemenuhan terhadap belanja kebutuhan kantor sehari-hari.
- b. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

Hasil tindak lanjut untuk menangani permasalahan sebagai berikut :

- a. Telah diusulkan anggaran untuk tahun 2026 pada Tahun 2024 mengenai perawatan dan pemeliharaan gedung termasuk belanja modal dan pemeliharaan dan belanja kebutuhan kantor sehari-hari.
- b. Telah dilakukan usul kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja untuk memenuhi kebutuhan SDM yang terbatas.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN

1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Pandeglang Provinsi Banten.

2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009.
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).

- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

BAB II

TINDAK LANJUT

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang oleh Pengadilan Tinggi Banten, sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Pandeglang memperoleh nilai sebesar 76,20 (BB) atau (BAIK)
2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penilaian (DIISI DENGAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT DI MATRIKS)

a. Perencanaan kinerja = bobot 30%. nilai yang diperoleh 24 %

1. Belum ada dokumen Program Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang berisi rekapitulasi perjanjian kinerja, dan rencana/ jadwal monev pengukuran kinerja internal. Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Panmud dan Kasub belum tercantum di eviden.
2. Rencana Aksi Ketua sudah ada, namun belum mencantumkan program / kegiatan terkait anggaran dipa 01.
3. Dokumen Renstra Januari 2023 yang diupload di website belum ditandatangani dan distempel.
4. Dalam penyusunan Renstra tertanggal 4 Januari 2023 masih belum teliti dalam hal:
 - a. Pada Renstra tertanggal 4 Januari 2023, pada matriks masih ada IKU persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, seharusnya tidak ada lagi sesuai SK Sekma nomor 173/SEK/SK/I/2022.
 - b. Pada matriks Renstra untuk masih terdapat target tahun 2023 dan 2024 untuk indikator kinerja persentase sisa perkara dan persentase penurunan sisa perkara.
 - c. IKU yang tercantum pada bab II Renstra agar diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja dan diberi uraian penjelasan sesuai pedoman terupdate. Namun untuk review renstra tertanggal 2 Januari 2024 sudah ada beberapa perbaikan.

5. Penjelasan IKU sudah ada. Namun pada SK Penetapan IKU yang diupload di website satker belum tercantum SK Sekma nomor 173/SEK/SK/III/2022 pada bagian mengingat (peraturan sebagai dasar SK Penetapan IKU). Penjelasan IKU perlu dilengkapi sesuai Lampiran II SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022.
6. Pengukuran kinerja dilakukan melalui rapat bulanan kantor dan pengumpulan data kinerja melalui SIPP.
7. Belum ada dokumen program kerja atau jadwal monitoring pengukuran kinerja tahun 2023, dan dokumen manajemen resiko dalam pengelolaan isu strategis atas pencapaian kinerja pada dokumen perencanaan.
8. Ada screenshot hasil input di aplikasi e-sakip komdanas, namun tidak ada laporan triwulan yang menjelaskan capaian kinerja di komdanas.
9. Tidak ditampilkan monev berkala sesuai rencana monev kinerja (laporan kinerja internal periodik, permasalahan, rekomendasi).
10. Komitmen setiap unit dalam mencapai kinerja sesuai eviden rapat bidang. Namun di eviden hanya ada rapat subag PTIP Agustus tahun 2022.
11. Komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja berdasarkan eviden rapat bulanan kantor. Untuk laporan kinerja individu tidak dilampirkan.
12. Pengadilan Negeri Pandeglang dalam mengisi LKE akuntabilitas kinerja tidak mengisi kolom catatan.

b. Pengukuran kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 21,9 %

1. Terdapat laporan triwulan LkjiP, namun seharusnya diganti dengan laporan monev rencana aksi perjanjian kinerja triwulan. Belum ada SK Pedoman Teknis pengukuran kinerja internal. Dan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang di dalamnya melibatkan Panmud Hukum sebagai Pelaksana / Bagian yang memiliki data tersebut.
2. Untuk poin 2.b.3. belum dilengkapi dengan data dukung Laporan Triwulan/Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan yang memuat data-data yang dikumpulkan untuk pengukuran kinerja, e -monev Bappenas dan MIS.
3. Pada poin 2.C.1. belum dilengkapi data dukung berupa rekap PKP, kebijakan pemberian Tukin, dan rekap pengajuan tukin 3 bulan terakhir.
4. Belum ada laporan pengukuran capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49. Dan eviden Laporan Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per triwulan sesuai surat Plh. Sekma nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.

5. Penjelasan IKU sudah ada. Namun pada SK Penetapan IKU yang diupload di website satker belum tercantum SK Sekma nomor 173/SEK/SK/III/2022 pada bagian mengingat (peraturan sebagai dasar SK Penetapan IKU). Penjelasan
6. Pengukuran kinerja dilakukan melalui rapat bulanan kantor dan pengumpulan data kinerja melalui SIPP.
7. Belum mencantumkan dokumen baperjakat pada poin 2.C.2.
8. Belum ada analisis efisiensi kinerja fisik terhadap realisasi anggaran.

c. Pelaporan kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,3 %

1. Eviden dokumen laporan kinerja secara berkala tidak lengkap setiap triwulan.
2. LkjIP tahun 2023 tidak direviu.
3. Laporan kinerja belum menginformasikan upaya nyata dan/atau hambatan.
4. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan karena yang diupload hanya ada eviden LkjIP.
5. Terdapat eviden sosialisasi SAKIP di tahun 2024, namun belum ada eviden berupa kegiatan rapat penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi per triwulan pada tahun 2023 dan rapat penyusunan LkjIP 2023.
6. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi keberhasilan kinerja, sebagai contoh terlihat dari capaian target persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi masih jauh dari 100%. Padahal dalam penetapan target seharusnya bisa direvisi dengan membandingkan realisasi tahun sebelumnya.
7. Pada data perkara anak yang diselesaikan melalui diversi, tidak terdapat kolom jumlah perkara diversi (sebagaimana rumusan pada dokumen IKU).
8. Data penilaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum tidak sesuai dengan penjelasan pada IKU. Tidak ada data jumlah permohonan layanan hukum dan tidak ada jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
9. Untuk capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti sebesar 3,97% tidak terdapat analisa penyebabnya.
10. Data penilaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) tidak sesuai dengan penjelasan pada IKU. Tidak ada data jumlah permohonan eksekusi dan tidak ada data jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan.

d. Evaluasi Internal = Bobot 25% nilai yang diperoleh 18 %

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun terdapat kondisi: Eviden yang diampirkan belum sepenuhnya menggambarkan laporan hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi).

B. Rekomendasi**a. Perencanaan kinerja**

1. Agar dibuat Program Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang berisi rekapitulasi perjanjian kinerja, dan rencana/ jadwal monev pengukuran kinerja internal.
2. Rencana Aksi Ketua untuk tahun 2024 agar direvisi mencantumkan juga program / kegiatan terkait anggaran dipa 01.
3. Agar lebih teliti dalam mengupload dokumen SAKIP, dokumen yang diupload harus yang sudah diformalkan (ditandatangani dan distempel).
4. Agar lebih teliti dalam penyusunan Renstra, baik pada penjelasan masing-masing bab, maupun penulisan pada matriks Renstra harus selaras dengan dokumen IKU dan kebijakan/peraturan terupdate dan pusat.
5. Agar menyajikan analisa terkait alokasi anggaran pada DIPA/RKA yang mana saja yang mendukung capaian setiap indikator kinerja utama;
6. Agar menyajikan analisa terkait alokasi anggaran pada DIPA/RKA yang mana saja yang mendukung capaian setiap indikator kinerja utama;
7. Agar melakukan pemantauan capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja utama dan menyajikan capaian dari seluruh indikator kineija utama dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja.
8. Pada aplikasi e-sakip komdanas, meskipun sudah diinput namun tetap harus dilampirkan dokumen laporan triwulan yang menjelaskan capaian kinerja di komdanas.
9. Format laporan dapat merujuk pada lampiran SK Sekma No. 2049/S EK/SK/XII/2022 halaman 49.
10. Agar melakukan pemantauan capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja utama dan menyajikan capaian dari seluruh indikator kineija utama dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja.

11. Agar disusun laporan kinerja unit/bagian secara periodik hingga mencapai hasil sesuai PK masing-masing yang diagendakan dalam suatu rapat capaian kinerja secara berkala.
12. Agar disusun laporan kinerja unit/bagian secara periodik hingga mencapai hasil sesuai PK masing-masing yang diagendakan dalam suatu rapat capaian kinerja secara berkala.
13. Pengadilan Negeri Pandeglang dalam mengisi LKE akuntabilitas kinerja agar mengisi kolom catatan. Seperti nomor dan tanggal juknis / pedoman, nomor dan tanggal Renstra, tanggal RKT, serta analisis lainnya yang diperlukan sesuai SK Sekma nomor 878/SEK/SKA/II/2022.

b. Pengukuran kinerja

1. Segera menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk SOP perlu mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data dan alur di dalamnya melibatkan Panmud Hukum sebagai Pelaksana / Bagian yang memiliki data tersebut, serta menyiapkan Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Rencana Aksi.
2. Agar dibuat penjelasan / laporan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang berdasarkan data kinerja dari SIPP, e-monev bappenas dan MIS
3. Untuk ke depannya agar data dukung dilengkapi dengan rekap PKP, kebijakan pemberian Tukin, dan rekap pengajuan tukin 3 bulan terakhir.
4. Agar membuat laporan pengukuran capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49. Dan eviden Laporan Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per triwulan sesuai surat Plh. Sekma nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.
5. Agar lebih teliti dalam penyusunan SK Penetapan IKU.
6. Agar dibuat penjelasan / laporan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang berdasarkan data kinerja dari SIPP, e-monev bappenas dan MIS.
7. Perlunya notulen rapat baperjakat yang menjelaskan pengukuran kinerja pegawai yang akan diusulkan penempatan/penghapusan jabatan
8. Perlu dibuat analisis efisiensi kinerja fisik terhadap realisasi anggaran.

c. Pelaporan Kinerja

1. Agar melengkapi dokumen laporan kinerja secara berkala setiap triwulan sesuai sesuai surat Plh. Sekma nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, pengukuran capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49.
2. Untuk selanjutnya agar dokumen LkjIP direviu.
3. Agar dalam laporan kinerja triwulan diinformasikan kualitas capaian beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
4. Lampirkan eviden rapat capaian kinerja secara berkala yang dipimpin oleh Ketua dan diikuti oleh seluruh pegawai
5. Lampirkan eviden rapat capaian kinerja secara berkala yang dipimpin oleh Ketua dan diikuti oleh seluruh pegawai
6. Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya agar ditambahkan menjadi minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga bukan hanya dibandingkan dengan capaian kinerja 1 tahun terakhir.
7. Untuk penghitungan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu agar digabung antara pidana biasa, cepat, anak dan praperadilan (sesuai di perjanjian kinerja), sehingga tidak perlu ada realisasi dan capaian target yang dirinci masing- masing untuk pidana biasa, cepat, anak dan praperadilan.
8. Dasar peraturan tentang IKM agar diupdate.
9. Untuk penghitungan realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu agar digabung antara gugatan, permohonan dan gugatan sederhana (sesuai di perjanjian kinerja). Sehingga tidak perlu ada capaian target yang dirinci masing- masing untuk gugatan, permohonan dan gugatan sederhana.
10. Realisasi dan capaian pada indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu agar digabung (tidak dipisah per jenis perkara) karena di perjanjian kinerja digabung.
11. Dasar peraturan tentang IKM agar diupdate
12. Realisasi dan capaian pada indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu agar digabung (tidak dipisah per jenis perkara) karena di perjanjian kinerja digabung

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilaksanakan, agar : Evidence yang dilampirkan menggambarkan laporan hasil evaluasi internal per triwulan per bagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan /rekomendasi.

C. Tindak Lanjut (DIISI DENGAN TARGET DI MATRIKS)

a. Perencanaan kinerja

1. Membuat dokumen program kerja dan Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Panmud dan Kasub
2. Membuat program kegiatan DIPA 01
3. Dokumen Renstra harus di tandatangani dan di stempel serta diupload di Website
4. Untuk segera mengupdate IKU
5. Update Renstra
6. Update Renstra DIPA 03
7. Membuat jadwal monitoring Pengukuran Kinerja dan dokumen manaemen resiko
8. Untuk membuat laporan Triwulan SAKIP di Komdanas
9. Untuk membuat Monev Kinerja Periodik
10. Untuk menambahkan dokumen rapat Kasubbag dan Panmud
11. Melampirkan laporan kinerja Individu (PKI) dan PKP
12. Untuk di isi bagian kolom catatan

b. Pengukuran kinerja

1. Membuat SK pedoman teknis Pengukuran Kinerja Internal dan membuat SOP pengumpulan data kinerja
2. Lengkapi data dukung laporan Monev triwulan e-monev bapenas dan MIS
3. Melampirkan data dukung rekap PKP dan rekap TUKIN
4. Membuat laporan Pengukuran capaian Kinerja
5. SK penetapan IKU yang di website dicantumkan SK Sekma nomor 173/SEK/SK/III/2022 pada bagian mengingat dan dilengkapi lampiran II SK Sekma No 2049/SEK/SK/XII/2022
6. Untuk membuat dokumen rapat bulanan dan pengumpulan data kinerja melalui SIPP
7. Melampirkan dokumen Baperjakat
8. Membuat analisis efisiensi kinerja fisik terhadap Rencana Anggaran

c. Pelaporan Kinerja

1. Melampirkan Laporan Kinerja Triwulan
2. Membuat reuiu dokumen LKJIP 2023
3. Membuat catatan dan hambatan Laporan Kinerja
4. Untuk memperbarui Evidence

5. Untuk membuat evidence rapat penyusunan laporan Evaluasi kinerja per triwulan dan evidence rapat penyusunan LKJIP
6. Membuat laporan evaluasi kinerja dalam revisi penetapan target mediasi dengan perbandingan realisasi target sebelumnya
7. Membuat kolom jumlah perkara diversifikasi pada dokumen IKU perkara anak
8. Laporan posbakum dilampirkan dan penyesuaian penilaian persentase layanan posbakum pada IKU
9. Membuat Analisa capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti sebesar 3,97 %
10. Melampirkan data jumlah permohonan eksekusi dan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dan penyesuaian penilaian persentase eksekusi
11. Memperbaiki dan mencantumkan dasar hukum IKM yang baru
12. Memperbaiki Realisasi dan capaian indikator kinerja isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Membuat laporan hasil evaluasi internal per triwulan per bagian dan lengkap sesuai PK juga melampirkan evidence terbaru.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*justitia bellen*) dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis, program kerja dan rencana kinerja tahunan sebagian besar telah tercapai terutama dalam hal penyelesaian perkara dan penyerapan anggaran.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II telah berjalan dengan optimal.

B. REKOMENDASI

1. Untuk penyajian data laporan yang lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya berpedoman pada rekomendasi penyusunan LKJIP dari Pengadilan Tinggi Banten.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penanganan Pengelolaan Perkara sesuai dengan SOP, serta Sarana dan Prasarana demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Pembangunan Zona Integritas demi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II

No	Rekomendasi LHE Tahun 2023	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A.	PERENCANAAN KINERJA							
1.	Agar dibuat Program Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang berisi rekapitulasi perjanjian kinerja, dan rencana/ jadwal monev pengukuran kinerja internal.	Belum ada dokumen Program Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang berisi rekapitulasi perjanjian kinerja, dan rencana/ jadwal monev pengukuran kinerja internal. Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Panmud dan Kasub belum	Membuat dokumen program kerja dan Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Panmud dan Kasub	Program kerja telah di sosialisasikan	1 bulan	Sub Bagian PTIP	Selesai	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

		tercantum di eviden.						
2.	Rencana Aksi Ketua untuk tahun 2024 agar direvisi mencantumkan juga program / kegiatan terkait anggaran dipa 01.	Rencana Aksi Ketua sudah ada, namun belum mencantumkan program / kegiatan terkait anggaran dipa 01.	Membuat program kegiatan DIPA 01	dokumen Program Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang berisi rekapitulasi perjanjian kinerja, dan rencana/ jadwal monev pengukuran kinerja internal telah dibuat	3 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses penyusunan data	
3.	Agar lebih teliti dalam mengupload dokumen SAKIP, dokumen yang diupload harus yang sudah diformalkan	Dokumen Renstra Januari 2023 yang diupload di website belum ditandatangani dan distempel.	Dokumen Renstra harus di tandatangi dan di stempel serta	Dokumen telah di tandatangi dan di stempel	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/media/files/2022022507111016962652946218810e9ce93_20220309071040_RKT+Tahun+2023.pdf



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	(ditandatangani dan distempel).		diupload di Website					
4.	Agar lebih teliti dalam penyusunan Renstra, baik pada penjelasan masing-masing bab, maupun penulisan pada matriks Renstra harus selaras dengan dokumen IKU dan kebijakan/peraturan terupdate dan pusat.	Dalam penyusunan Renstra tertanggal 4 Januari 2023 masih belum teliti dalam hal: a. Pada Renstra tertanggal 4 Januari 2023, pada matriks masih ada IKU persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, seharusnya tidak ada lagi sesuai SK Sekma nomor 173/SEK/SK/I/2022. b. Pada matriks Renstra untuk masih terdapat target tahun 2023 dan 2024 untuk indikator kineija persentase sisa perkara dan persentase	Untuk segera mengupdate IKU	IKU telah di Update	3 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses penyusunan data	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

		penurunan sisa perkara. c. IKU yang tercantum pada bab II Renstra agar diselaraskan dengan Petjanjian Kinerja dan diberi uraian penjelasan sesuai pedoman terupdate. Namun untuk revidu renstra tertanggal 2 Januari 2024 sudah ada beberapa perbaikan.						
5.	Agar menyajikan analisa terkait alokasi anggaran pada DIPA/RKA yang mana saja yang mendukung capaian setiap indikator kinerja utama;	Penjelasan IKU sudah ada. Namun pada SK Penetapan IKU yang diupload di website satker belum tercantum SK Sekma nomor 173/SEK/SK/III/2022 pada bagian mengingat (peraturan	Update Renstra	RENSTRA Telah di update	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/media/files/2023021604020249629291163edaaba9ef4e_20230216040450_LKJIP+PN+Pandeglang+Tahun+2022.pdf



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

		sebagai dasar SK Penetapan IKU). Penjelasan IKU perlu dilengkapi sesuai Lampiran II SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022.						
6.	Agar menyajikan analisa terkait alokasi anggaran pada DIPA/RKA yang mana saja yang mendukung capaian setiap indikator kinerja utama;	Pengukuran kinerja dilakukan melalui rapat bulanan kantor dan pengumpulan data kinerja melalui SIPP.	Update Renstra DIPA 03	Renstra DIPA 03 telah di Update	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/media/files/2023021603482717866904863eda78be372b_20230620074201_Reviu+Renstra+Tahun+2020-2024+fix.pdf
7.	Agar melakukan pemantauan capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja utama dan menyajikan capaian dari seluruh indikator kinerja utama dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja	Belum ada dokumen program kerja atau jadwal monitoring pengukuran kinerja tahun 2023, dan dokumen manajemen resiko dalam pengelolaan isu strategis atas pencapaian kinerja pada	Membuat jadwal monitoring Pengukuran Kinerja dan dokumen manajemen resiko	jadwal monitoring Pengukuran Kinerja dan dokumen manajemen resiko telah di buat	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/tag/T05-P04-88/



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

		dokumen perencanaan						
8.	Pada aplikasi e-sakip komdanas, meskipun sudah diinput namun tetap harus dilampirkan dokumen laporan triwulan yang menjelaskan capaian kinerja di komdanas. Format laporan dapat merujuk pada lampiran SK Sekma No. 2049/S EK/SK/XII/2022 halaman 49.	Ada screenshot hasil input di aplikasi e-sakip komdanas, namun tidak ada laporan triwulan yang menjelaskan capaian kinerja di komdanas.	Untuk membuat laporan Triwulan SAKIP di Komdanas	Melampirkan dokumen laporan triwulan	1 bulan	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses penyusunan data	
9.	Agar melakukan pemantauan capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja utama dan menyajikan capaian dari seluruh indikator kinerja utama dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja	Tidak ditampilkan monev berkala sesuai rencana monev kinerja (laporan kinerja internal periodik, permasalahan, rekomendasi).	Untuk membuat Monev Kinerja Periodik	Monev kinerja telah dibuat secara periodik	3 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses perbaikan	
10.	Agar disusun laporan kinerja unit/bagian secara periodik hingga mencapai hasil sesuai PK masing-masing yang	Komitmen setiap unit dalam mencapai kinerja sesuai eviden rapat bidang. Namun di eviden	Untuk menambahkan dokumen rapat Kasubbag dan Panmud	Dokumen rapat Kasubbag dan Panmud telah ditambahkan	3 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses pengisian data	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	diagendakan dalam suatu rapat capaian kinerja secara berkala.	hanya ada rapat subag PTIP Agustus tahun 2022.						
11.	Agar disusun laporan kinerja unit/bagian secara periodik hingga mencapai hasil sesuai PK masing-masing yang diagendakan dalam suatu rapat capaian kinerja secara berkala.	Komitmen setiap pegawai dalam mencapai kineija berdasarkan eviden rapat bulanan kantor. Untuk laporan kineija individu tidak dilampirkan.	Melampirkan laporan kinerja Individu (PKI) dan PKP	laporan kinerja Individu (PKI) dan PKP telah dilampirkan				
12.	Pengadilan Negeri Pandeglang dalam mengisi LKE akuntabilitas kinerja agar mengisi kolom catatan. Seperti nomor dan tanggal juknis / pedoman, nomor dan tanggal Renstra, tanggal RKT, serta analisis lainnya yang diperlukan sesuai SK Sekma nomor 878/SEK/SKA/II/2022	Pengadilan Negeri Pandeglang dalam mengisi LKE akuntabilitas kineija tidak mengisi kolom catatan.	Untuk di isi bagian kolom catatan	Kolom catatan telah di isi				
B.	PENGUKURAN KINERJA							



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

1.	Segera menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk SOP perlu mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data dan alur di dalamnya melibatkan Panmud Hukum sebagai Pelaksana / Bagian yang memiliki data tersebut, serta menyiapkan Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Rencana Aksi.	Terdapat laporan triwulan LkjiP, namun seharusnya diganti dengan laporan monev rencana aksi perjanjian kinerja triwulan. Belum ada SK Pedoman Teknis pengukuran kinerja internal. Dan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang di dalamnya melibatkan Panmud Hukum sebagai Pelaksana / Bagian yang memiliki data tersebut.	Membuat SK pedoman teknis Pengukuran Kinerja Internal dan membuat SOP pengumpulan data kinerja	SK pedoman teknis Pengukuran Kinerja Internal dan membuat SOP pengumpulan data kinerja telah di buat	2 minggu	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Masih dalam proses penyusunan SK	
2.	Agar dibuat penjelasan / laporan pemantauan atas pengukuran capaian	Untuk poin 2.b.3. belum dilengkapi dengan data dukung Laporan	Lengkapi data dukung laporan Monev	Data dukung laporan Monev triwulan e-	1 minggu	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Masih dalam proses penyusunan SK	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	kinerja unit di bawahnya secara berjenjang berdasarkan data kinerja dari SIPP, e-monev bapenas dan MIS	Triwulan/Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan yang memuat data-data yang dikumpulkan untuk pengukuran kinerja, e -monev Bapenas dan MIS.	triwulan e-monev bapenas dan MIS	monev bapenas dan MIS telah dilengkapi				
3.	Untuk ke depannya agar data dukung dilengkapi dengan rekap PKP, kebijakan pemberian Tukin, dan rekap pengajuan tukin 3 bulan terakhir.	Pada poin 2.C.1. belum dilengkapi data dukung berupa rekap PKP, kebijakan pemberian Tukin, dan rekap pengajuan tukin 3 bulan terakhir.	Melampirkan data dukung rekap PKP dan rekap TUKIN	Data dukung rekap PKP dan rekap TUKIN telah dilampirkan	1 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses penyusunan data	
4.	Agar membuat laporan pengukuran capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49. Dan eviden Laporan Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per triwulan sesuai surat Plh. Sekma nomor	Belum ada laporan pengukuran capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49. Dan eviden Laporan Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	Membuat laporan Pengukuran capaian Kinerja	Laporan Pengukuran capaian Kinerja telah dibuat	1 hari	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Selesai	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
 Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
 www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.	per triwulan sesuai surat Plh. Sekma nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.						
5.	Agar lebih teliti dalam penyusunan SK Penetapan IKU.	Penjelasan IKU sudah ada. Namun pada SK Penetapan IKU yang diupload di website satker belum tercantum SK Sekma nomor 173/SEK/SK/III/2022 pada bagian mengingat (peraturan sebagai dasar SK Penetapan IKU). Penjelasan	SK penetapan IKU yang di website dicantumkan SK Sekma nomor 173/SEK/SK/III/2022 pada bagian mengingat dan dilengkapi lampiran II SK Sekma No 2049/SEK/SK/XII/2022	Telah dicantumkan SK penetapan IKU yang di website dicantumkan SK Sekma nomor 173/SEK/SK/III/2022 pada bagian mengingat dan dilengkapi lampiran II SK Sekma No 2049/SEK/SK/XII/2022	2 minggu	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Masih dalam proses pembuatan notulen	
6.	Agar dibuat penjelasan / laporan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	Pengukuran kinerja dilakukan melalui rapat bulanan kantor dan pengumpulan	Untuk membuat dokumen rapat bulanan dan pengumpulan	Dokumen rapat bulanan dan pengumpulan data kinerja melalui SIPP telah dibuat	1 minggu	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Masih dalam proses pembuatan analisis	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	berdasarkan data kinerja dari SIPP, e-monev bappenas dan MIS.	data kinerja melalui SIPP.	n data kinerja melalui SIPP					
7.	Perlunya notulen rapat baperjakat yang menjelaskan pengukuran kinerja pegawai yang akan diusulkan penempatan/penghapusan jabatan	Belum mencantumkan dokumen baperjakat pada poin 2.C.2.	Melampirkan dokumen Baperjakat	Dokumen Baperjakat telah dilampirkan				
8.	Perlu dibuat analisis efisiensi kinerja fisik terhadap realisasi anggaran.	Belum ada analisis efisiensi kinerja fisik terhadap realisasi anggaran.	Membuat analisis efisiensi kinerja fisik terhadap Rencana Anggaran	Analisis efisiensi kinerja fisik terhadap Rencana Anggaran telah dibuat				
C.	PELAPORAN KINERJA							
1.	Agar melengkapi dokumen laporan kinerja secara berkala setiap triwulan sesuai surat Plh. Sekma nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, pengukuran	Eviden dokumen laporan kinerja secara berkala tidak lengkap setiap triwulan.	Melampirkan Laporan Kinerja Triwulan	Laporan Kinerja Triwulan telah dilampirkan	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/tag/T05-P04-88/



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49.							
2.	Untuk selanjutnya agar dokumen LkjiP direviu.	LkjiP tahun 2023 tidak direviu.	Membuat reviu dokumen LKJIP 2023	Dokumen LKJIP 2023 telah direviu	1 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses reviu dokumen	
3.	Agar dalam laporan kinerja triwulan diinformasikan kualitas capaian beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Laporan kinerja belum menginfokan upaya nyata dan/atau hambatannya.	Membuat catatan dan hambatan Laporan Kinerja	Catatan dan hambatan Laporan Kinerja telah dilampirkan	1 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses pembaruan laporan	
4.	Lampirkan eviden rapat capaian kinerja secara berkala yang dipimpin oleh Ketua dan diikuti oleh seluruh pegawai	Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan karena yang diupload hanya ada eviden LkjiP.	Untuk memperbarui Evidence	Evidence telah diperbaharui	1 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses pembaruan laporan	
5.	Lampirkan eviden rapat capaian kinerja secara berkala yang dipimpin oleh Ketua dan diikuti oleh seluruh pegawai	Terdapat eviden sosialisasi SAKIP di tahun 2024, namun belum ada eviden berupa kegiatan rapat penyusunan Laporan Evaluasi	Untuk membuat evidence rapat penyusunan laporan Evaluasi kinerja per triwulan dan	Evidence rapat penyusunan laporan Evaluasi kinerja per triwulan dan evidence rapat	1 bulan	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses penyusunan	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

		Kinerja Instansi per triwulan pada tahun 2023 dan rapat penyusunan LKJIP 2023.	evidence rapat penyusunan LKJIP	penyusunan LKJIP telah dibuat				
6.	Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya agar ditambahkan menjadi minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga bukan hanya dibandingkan dengan capaian kinerja 1 tahun terakhir.	Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi keberhasilan kinerja, sebagai contoh terlihat dari capaian target persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi masih jauh dari 100%. Padahal dalam penetapan target seharusnya bisa direvisi dengan membandingkan realisasi tahun sebelumnya.	Membuat laporan evaluasi kinerja dalam revisi penetapan target mediasi dengan perbandingan realisasi target sebelumnya	Laporan evaluasi kinerja dalam revisi penetapan target mediasi dengan perbandingan realisasi target sebelumnya telah dibuat	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/tag/T05-P04-88/2023021604020249629291163edaaba9ef4e.html#tabs Tabs_Group_name:tabLampiran
7.	Untuk penghitungan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat	Pada data perkara anak yang diselesaikan melalui diversi,	Membuat kolom jumlah perkara diversi pada	Kolom jumlah perkara diversi pada dokumen	2 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses perbaikan	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	waktu agar digabung antara pidana biasa, cepat, anak dan praperadilan (sesuai di perjanjian kinerja), sehingga tidak perlu ada realisasi dan capaian target yang dirinci masing-masing untuk pidana biasa, cepat, anak dan praperadilan.	tidak terdapat kolom jumlah perkara diversifikasi (sebagaimana rumusan pada dokumen IKU).	dokumen IKU perkara anak	IKU perkara anak telah dibuat				
8.	Dasar peraturan tentang IKM agar diupdate.	Data penilaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum tidak sesuai dengan penjelasan pada IKU. Tidak ada data jumlah permohonan layanan hukum dan tidak ada jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang	Laporan posbakum dilampirkan dan penyesuaian penilaian persentase layanan posbakum pada IKU	Laporan posbakum dan penyesuaian penilaian persentase layanan posbakum pada IKU telah dilampirkan	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/tag/T05-P04-88/2023021604020249629291163edaaba9ef4e.html#tabs Tabs_Group_name:tabLampiran



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

		mendapatkan layanan bantuan hukum.						
9.	Untuk penghitungan realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu agar digabung antara gugatan, permohonan dan gugatan sederhana (sesuai di perjanjian kinerja). Sehingga tidak perlu ada capaian target yang dirinci masing-masing untuk gugatan, permohonan dan gugatan sederhana.	Untuk capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti sebesar 3,97% tidak terdapat analisa penyebabnya.	Membuat Analisa capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti sebesar 3,97 %	Analisa capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti sebesar 3,97 % telah dibuat	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/tag/T05-P04-88/2023021604020249629291163edaaba9ef4e.html#tabs Tabs_Group_name:tabLampiran
10.	Realisasi dan capaian pada indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu agar digabung (tidak dipisah per jenis perkara) karena di	Data penilaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) tidak sesuai dengan penjelasan pada IKU. Tidak ada data jumlah permohonan	Melampirkan data jumlah permohonan eksekusi dan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dan penyesuaian penilaian	Data jumlah permohonan eksekusi dan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dan penyesuaian penilaian persentase	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/tag/T05-P04-88/2023021604020249629291163edaaba9ef4e.html#tabs Tabs_Group_name:tabLampiran



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
 Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
 www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

	perjanjian kineija digabung.	eksekusi dan tidak ada data jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan.	persentase eksekusi	eksekusi telah dilampiran				
11.	Dasar peraturan tentang IKM agar diupdate	Peraturan mengenai IKM belum diupdate	Memperbaiki dan mencantumkan dasar hukum IKM yang baru	Peraturan IKM telah diupdate	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/link/2020072415393513143469465f1a9e47dd89b.html#tabs Tabs_Group_name:tabLampiran
12.	Realisasi dan capaian pada indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu agar digabung (tidak dipisah per jenis perkara) karena di perjanjian kinerja digabung	Realisasi dan capaian indikator kinerja isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu belum digabung	Memperbaiki Realisasi dan capaian indikator kinerja isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Realisasi dan capaian indikator kinerja isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah diperbaiki	1 hari	Sub Bagian PTIP	Selesai	https://pn-pandeglang.go.id/main/tag/T05-P04-88/2023021604020249629291163edaaba9ef4e.html#tabs Tabs_Group_name:tabLampiran
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL							
1.	Terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Membuat laporan hasil evaluasi	Laporan hasil evaluasi internal	1 minggu	Sub Bagian PTIP	Masih dalam proses pembuatan	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

dilaksanakan, agar : Evidence yang dilampirkan menggambarkan laporan hasil evaluasi internal pertriwulan per bagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hamabatan /rekomendasi)	telah dilaksanakan, namun terdapat kondisi: Eviden yang diampirkan belum sepenuhnya menggambarkan laporan hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi).	internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK juga melampirkan evidence terbaru	pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK telah di buat dan evidence telah diperbarui				
--	--	--	---	--	--	--	--

Pandeglang, 28 November 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang


* Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.
Nip. 19800312 200312 1 001